

## **Nadiani Saridin: eks-Gerwani dan Ketua Umum YPKP 1965 Sumatera Barat (2002-2021)**

**Alberthus<sup>1(\*)</sup>, Najmi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

(\*)albertrosbat21@gmail.com

### **ABSTRACT**

*This article is a biographical study that describes Nadiani Saridin's life journey as chairman of the 1965 YPKP in West Sumatra starting from its founding in 2002 until now 2021. The focus of this research examines Nadiani Saridin's background or journey to becoming general chairman of the 1965 YPKP in West Sumatra and what were his activities as chairman of the 1965 YPKP in West Sumatra. Nadiani's biographer is a thematic biography, namely writing a biography that emphasizes certain themes, namely by focusing on some of the important things from the character's life. This paper uses historical research methods which consist of four stages, namely heuristics (finding and gathering sources), source criticism (consisting of external and internal criticism), interpretation (interpretation of sources) and historiography (history writing). From the results of the research it can be explained that Nadiani Saridin as General Chair of the 1965 West Sumatra YPKP said that the 1965 West Sumatra YPKP is a foundation that has a focus on conducting research related to gross human rights violations in the 1965/1966 incident as well as efforts to assist victims in West Sumatra who were affected impact of the event in order to get back their rights. Since the founding of YPKP 1965 West Sumatra, Nadiani explained that he has always carried out investigations and research in West Sumatra related to the September 30 violence. In conducting her research, Nadiani Saridin visited various regions, including: Agam/Bukittinggi, South Coast, Pariaman/Padang Pariaman, Padang, Tanah Datar, 50 Cities/Payakumbuh, Kab.Solok/Solok, Sawahlunto, Sijunjung, Padang Panjang and Pasaman.*

**Keywords: Biography, YPKP 1965, West Sumatra, G30S/PKI.**

### **ABSTRAK**

Artikel ini merupakan kajian biografi yang menggambarkan perjalanan hidup Nadiani Saridin sebagai ketua umum YPKP 1965 di Sumatera Barat dimulai dari berdirinya tahun 2002 hingga sekarang 2021. Fokus penelitian ini mengkaji bagaimana latar belakang ataupun perjalanan Nadiani Saridin hingga sampai menjadi ketua umum YPKP 1965 di Sumatera Barat serta apa saja aktivitasnya sebagai ketua umum YPKP 1965 di Sumatera barat. Penulis biografi Nadiani merupakan biografi tematis yaitu penulisan biografi yang ditekankan pada tema-tema tertentu, yaitu dengan memfokuskan pada sebagian dari hal-hal penting dari kehidupan si tokoh. Tulisan ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan yaitu heuristik (mencari dan mengumpulkan sumber), kritik sumber (yang terdiri dari kritik ekstern dan intern) interpretasi (penafsiran sumber) dan historiografi (penulisan sejarah). Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa Nadiani Saridin selaku Ketua Umum YPKP 1965 Sumatera Barat mengatakan bahwa YPKP 1965 Sumatera Barat merupakan sebuah yayasan yang memiliki fokus dalam melakukan penelitiannya terkait pelanggaran HAM berat pada peristiwa 1965/1966 serta upaya pendampingan terhadap para korban di Sumatera Barat yang terkena dampak dari adanya

peristiwa tersebut agar mendapatkan kembali hak-hak mereka. Sejak berdirinya YPKP 1965 Sumatera Barat, Nadiani menjelaskan untuk selalu melakukan penyelidikan dan penelitian di Sumatera Barat terkait dengan peristiwa kekerasan 30 September. Dalam melakukan penelitiannya, Nadiani Saridin mengunjungi berbagai daerah, antara lain: Agam/Bukittinggi, Pesisir Selatan, Pariaman/Padang Pariaman, Padang, Tanah Datar, 50 Kota/Payakumbuh, Kab.Solok/Solok, Sawahlunto, Sijunjung, Padang Panjang Dan Pasaman.

**Kata Kunci: Biografi, YPKP 1965, Sumatera Barat, G30S/PKI.**

## **PENDAHULUAN**

Belakangan setelah reformasi tahun 1998 di Indonesia, gelombang kelahiran kelompok-kelompok kepentingan baru merebak secara nasional. Suasana politik yang demokratis yang ditandai dengan ledakan partisipasi mengakibatkan sebagian anggota masyarakat menyampaikan tuntutan-tuntutannya dengan menggunakan saluran-saluran baru di luar partai-partai politik, dalam bentuk kelompok-kelompok kepentingan. Salah satu kelompok kepentingan (interest group) yang lahir di awal reformasi di Indonesia adalah YPKP 1965. YPKP 1965 didirikan pada tahun 1999 oleh para eks-tahanan politik peristiwa 1965 yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang mereka anggap telah dirampas oleh negara dalam peristiwa 1965 (Maiwan Mohammad, 2016, hal.81). Menurut YPKP 1965 setidaknya ada dua hal terkait dengan pelanggaran HAM yang mendesak untuk diselesaikan dan harus mendapatkan perhatian khusus. Pertama, pengakuan negara atas terjadinya berbagai pelanggaran HAM. Negara harus mengakui bahwa benar telah terjadi pelanggaran HAM berupa penyiksaan, pembunuhan, penahanan sewenang-wenang terhadap mereka yang dituduh terlibat dalam peristiwa 1965. YPKP 1965 berpendapat bahwa negara harus mengakui telah terjadi pelanggaran HAM kepada para eks-tapol dan mengembalikan nama baik mereka. Pengakuan ini adalah sebagai pra syarat yang diajukan YPKP 1965 untuk terwujudnya rekonsiliasi nasional dan keadilan bagi korban. Akan tetapi, hal ini sulit terwujud karena belum adanya kemauan politik negara dan penolakan oleh masyarakat yang beranggapan akan memunculkan gerakan komunisme dan bangkitnya kembali PKI di Indonesia yang dapat membawa Indonesia kembali ke konflik horizontal. (Wardaya,2010,hlm 109).

Pasca Orde Baru pada tahun 1999 Nadiani dipertemukan oleh bapak Hasan Rahid, penulis buku *Pergulatan Muslim Komunis* sekaligus pendiri YPKP pusat pada tahun 1999 di Tangerang untuk menjadikan Nadiani sebagai perwakilan YPKP di Sumatera Barat yang diresmikan pada Sabtu, 27 Juli tahun 2002 di gedung RRI Bukittinggi. Sejak berdirinya YPKP 1965 Sumatera Barat tahun 2002, Nadiani melakukan penelitian menemukan fakta-fakta serta bukti adanya pembunuhan di berbagai daerah di seluruh Sumatera Barat terkait dengan peristiwa G30S 1965. Untuk itu, YPKP 1965 mengunjungi daerah-daerah diantaranya: Agam dan Bukittinggi, Pesisir Selatan, Pariaman dan Padang Pariaman, Padang, Tanah Datar, 50 Kota/Payakumbuh, Kab.Solok/Solok, Sawahlunto, Sijunjung,

Padang Panjang Dan Pasaman (Dokumen, Arsip Nadiani). Nadiani Saridin aktif meneliti para korban kekerasan 1965 di Sumatera Barat untuk memperjuangkan hak-hak korban. Pada tahun 2016 Pertemuan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966 (YPKP) dari berbagai kota dibubarkan kelompok masyarakat. Nadiani Saridin sebagai perwakilan dari YPKP Sumatera Barat mengatakan dirinya menjadi saksi mata pada pembubaran kegiatan tersebut. Pihaknya juga telah menjelaskan pertemuan tersebut untuk membahas informasi dan undangan terkait penyelenggaraan Simposium Nasional. Selain itu pertemuan tersebut juga dalam rangka memberikan laporan terkait pelanggaran HAM pada tragedi 1965. Namun pertemuan tersebut dituding untuk membangkitkan PKI (tempo.co diakses 23 februari 2015). Nadiani Saridin juga pernah menjadi aktivis Gerwani pada tahun 1964, beliau bergabung dengan Gerwani untuk memperjuangkan hak-hak perempuan karena maraknya poligami dan adanya ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan dalam berkehidupan sosial. Namun, tidak sampai satu tahun keaktifannya di Gerwani, tepatnya pada tanggal 5 November 1965 pasca peristiwa G30S 1965, Nadiani dipanggil oleh tim PDK (Pendidikan dan Kebudayaan) dan dipecat dari pekerjaannya sebagai pendidik karena bergabung dalam organisasi Gerwani dan menjadi tahanan luar wajib lapor 2x sehari kepada pihak kepolisian. Ada beberapa kajian yang relevan dengan artikel ini seperti tulisan yang ditulis di dalam jurnal ilmu politik oleh Adipta Wisnu yaitu Peran YPKP dalam memperjuangkan hak-hak korban G30S (studi kasus di Kabupaten Pati) yang didalamnya mengkaji tentang bagaimana YPKP Pati melakukan konsolidasi dengan mengadakan rapat setiap harinya agar terjalinnya komunikasi sesama anggota.

YPKP Pati juga melakukan komunikasi kepada organisasi seperti LPSK. Kerjasama YPKP Pati dengan LPSK ini ternyata memberikan dampak baik bagi anggota YPKP karena adanya bantuan-bantuan kesehatan yang diberikan oleh anggota YPKP Pati. Selanjutnya, Fauzir rahim dalam tulisannya yang berjudul, Komunikasi YPKP 1954 Sumatera Barat terkait kasus pelanggaran HAM. Tulisan tersebut menjelaskan tentang bagaimana proses komunikasi yang dilakukan oleh YPKP 65 Sumatera Barat dengan KOMNAS HAM dan LPSK. Dari dua penelitian diatas, maka akan ditemukan perbedaan dengan apa yang akan penulis teliti dilihat dari sejarah kepemimpinan YPKP 1965 di Sumatera Barat yaitu biografi Nadiani Saridin selaku ketua umum YPKP 1965 Sumatera Barat. Nadiani Saridin sampai hari ini masih aktif berjuang meneliti para korban kekerasan 1965 di Sumatera Barat untuk memperjuangkan hak-hak korban. Namun tidak banyak mengetahui bagaimana perjalanan hidup Nadiani Saridin dan yang lebih penting untuk mengetahui usaha maupun perjuangan Nadiani Saridin selama menjadi ketua umum YPKP 1965 dalam memperjuangkan hak-hak korban kekerasan 1965 di Sumatera Barat. Tulisan ini diharapkan bermanfaat untuk mengetahui perjalanan hidup Nadiani Saridin sebagai ketua umum YPKP 1965 Sumatera Barat hingga sampai sekarang.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian sejarah yang menggunakan langkah-langkah metode penelitian sejarah. Maksud dari metode penelitian sejarah ini adalah proses

menguji dan menganalisis secara kritis dari data rekaman dan peninggalan masa lampau. Ada beberapa langkah yang harus dilalui oleh penulis yaitu heuristik (pengumpulan data), kritik sumber, interpretasi dan historiografi (penulisan) (Goottschalk, 1985, hlm. 32). Adapun sumber primer yang penulis gunakan adalah melakukan wawancara langsung dengan tokoh yaitu Nadiani Saridin. Penulis juga mendapatkan beberapa dokumen di kediaman Nadiani Saridin sekaligus sebagai kantor YPKP 1965 Sumatera Barat. Adapun sumber sekunder yang penulis gunakan adalah beberapa telaah kepustakaan yang berkaitan dengan kajian tentang yang penulis teliti yaitu diantaranya tulisan yang dibuat oleh Adipta Wisnu di dalam jurnal ilmu politik tentang peran YPKP kabupaten Pati dalam memperjuangkan hak-hak korban G30s serta handout metode penelitian biografi penulisan biografi yang ditulis oleh Mestika Zed. Pada tahap **kritik sumber**, peneliti merumuskan hasil wawancara yang telah diperoleh dan membandingkan memilih data yang akan dijadikan fakta dalam penulisan ini. Pada tahap **interpretasi**, penulis melakukan penafsiran pada sumber yang dikritik, kemudian fakta tersebut disusun berdasarkan masalah penelitian yang ingin ditujukan. Tahap akhir yaitu historiografi, tahap ini penulis melakukan penulisan sejarah berdasarkan fakta-fakta yang telah disusun kemudian ditulis sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan sejarah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Nadiani Saridin lahir sebagai anak pertama dari perkawinan bapak Saridin dan ibu Nurana yang berasal dari Magek, kabupaten Agam 11 November 1941. Nadiani menamatkan sekolah di Sekolah Dasar 03 Matur, Agam. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di SGB (Sekolah Guru Bantu) Matur. Namun karena pergolakan PRRI, beliau hanya bertahan 3 tahun dan melanjutkannya kembali 1 tahun di Bukittinggi. Tiga bulan setelah lulus dari SGB, Nadiani mengajar di SD 04 Bukittinggi Ateh Ngarai, Bukittinggi di masanya dan melanjutkan sekolahnya di SGA (Sekolah Guru Atas) PGRI, Belakang Balok 3 tahun di Bukittinggi. Sewaktu usia 16 tahun, Nadiani tinggal bersama pamannya karena ayahnya bertugas di Jambi. Namun, banyak keluhan yang terjadi pada Nadiani karena pamannya yang berpoligami. Disamping itu, Nadiani juga aktif di organisasi NA (Nadathul Aisyiyah) tetapi Nadiani menemukan adanya intimidasi-intimidasi dari masyarakat kepada perempuan. Banyak perempuan yang tidak maju karena adanya intimidasi dari masyarakat setempat pada masanya. Contohnya, masyarakat melarang perempuan untuk aktif dalam kegiatan sosial serta dilarang berolahraga dan berkesenian seperti pada laki-laki umumnya. Sampai pada masa PRRI (1958), Nadiani tidak lagi tinggal bersama pamannya karena neneknya pulang dari Jambi dan hidup bertiga dengan adiknya. Boleh dikatakan keluarga nenek Nadiani adalah orang-orang *borjuis* istilahnya pada saat itu. Tetapi di dalam keluarga intinya sendiri, Nadiani juga mengalami intimidasi-intimidasi serupa seperti dilarang melakukan aktivitas menari, berolahraga, dan seterusnya. Jadi, dalam hal inilah yang membuat Nadiani tertekan dan menolak hal demikian. Setelah selesai menyelesaikan sekolah, Nadiani berkecukupan menanam kacang lalu terkadang berolahraga bermain badminton dan berkesenian. Bahkan pernah suatu hari uang hasil upah menanam kacang itu dibelikan bulu untuk bermain badminton. Tetapi keluarga

besarnya marah dengan kesibukannya yang selalu berolahraga badminton dan bahkan disebut sebagai “anak yang tidak mau diatur”. Kemudian, sewaktu berjalan-jalan dengan sepeda, Nadiani ingat menemukan kantor “Gerakan Wanita Indonesia” di dekat gereja protestan di depan RS.Madina Sekarang. Lalu beliau masuk ke perpustakaan Gerwani itu dan menemukan majalah namanya *Majalah Kartini*. Namun, beliau belum minat untuk masuk Gerwani saat itu karena jiwanya waktu itu masih suka olahraga dan kesenian sehingga bergabung dengan LEKRA (Lembaga Kebudayaan Rakyat). Pada tahun 1963 Nadiani menikah dengan Akhyar Boer waktu itu Guru di SMP Pekan Kamis. Dalam tahun pertama Nadiani pisah karena tuntutan pekerjaan bapak Akhyar Boer dipindahkan ke IKIP padang. Dengan itu pada tahun 1964, Nadiani bebas berorganisasi dan akhirnya masuk kedalam organisasi Gerwani karena Gerwani adalah Perjuangan Hak-Hak Wanita sebab, dahulu di kampung-kampung masih banyak poligami-poligami dan itu didominasi oleh orang-orang kaya. Jadi, inilah juga yang mendorong beliau masuk Gerwani. (Wawancara dengan Nadiani Saridin).

### **Periode Gerwani**

Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) merupakan kelanjutandari Gerakan Wanita Indonesia Sedar (Gerwis) yang berdiri pada tanggal 4 Juli 1950, di Semarang (Diniah, 2007: 12). Pada tahun 1955, Gerwani melakukan serangkaian kegiatan yang berbeda, yakni Gerwani mulai menitikberatkan perhatiannya pada Pemilu 1955. Ketika kampanye Pemilu dimulai, Gerwani memutuskan untuk ambil bagian dan mendukung kampanye untuk para calon PKI, namun tidak mengajukan nama-nama calonnya sendiri, walaupun Gerwani mendapat kebebasan politik tertentu. Hampir sebanyak 23.480 orang anggota Gerwani ikut di dalam kegiatan kampanye pemilu 1955 ini (Wieringa, 1998: 308). Pada tahun 1964, Nadiani masuk ke dalam organisasi Gerwani, karena beliau sebagai seorang pendidik atau pengajar beliau dengan temannya mendirikan sekolah taman kanak-kanak Melati. TK Melati itulah yang menjadi wadah anak-anak perempuan untuk bebas melakukan apapun. Jadi, Nadiani mengumpulkan anak-anak miskin di desa-desa dan menghimpun mereka agar bisa sekolah di TK Melati dan itu gratis tanpa dipungut biaya. Namun tidak sampai satu tahun di Gerwani, terjadi peristiwa kekerasan yang dikenal dengan G30S PKI 1965. Waktu saat itu Nadiani selalu difitnah sebagai orang PKI bahkan rumahnya diobrak abrik dan diporak porandakan dalam kondisi anaknya yang masih kecil. Bahkan orang tuanya dinonaktifkan dari pekerjaannya karena Nadiani diduga terlibat dengan PKI. Kejadian paling Nadiani ingat saat itu adalah lukisan proklamasi yang ukirannya keemasan dihancurkan di dalam rumahnya sendiri. Anak beliau bahkan dicap sebagai anak PKI ditempat pengajiannya di Masjid Mubarak, Stasiun. Itu membuat anaknya trauma sehingga itulah alasan utama ibu menyekolahkan anaknya ke Yayasan Prayoga.

Lima hari pasca G30S PKI 1965, tepatnya tanggal 5 November 1965, Nadiani dipecat dan diberhentikan karena masuk Gerwani dan harus menjadi tahanan luar wajib lapor 2x sehari ke kepolisian Bukittinggi saat itu. Waktu itu Nadiani harus melapor ke kepolisian 2x sehari dengan kondisinya masih menggendong anak-anaknya yang masih bayi. Menurut Nadiani Gerwani bukanlah afiliasi PKI, karena menurutnya Gerwani hanya



memperjuangkan hak-hak perempuan. Hanya saja waktu itu ada program PKI yang namanya “anti poligami” yang kebetulan selaras dengan tujuan Gerwani. Lanjutnya, karena didalam PKI itu sendiri jika ditemukan anggotanya melakukan poligami, harus keluar dari partai. Inilah yang membuat orang menyamaratakan bahwa Gerwani itu adalah PKI dan dijadikan dalil untuk menghancurkan Gerwani. Jadi, intinya PKI dan Gerwani bukanlah afiliasi hanya saja salah satu program PKI yaitu anti poligami yang kebetulan sama dengan tujuan utama dari Gerwani tetapi hal itu membentuk persepsi yang salah bagi masyarakat. Itulah sebabnya menurut ibu pada 30 september 1965, Gerwani dihancurkan.(Wawancara dengan Nadiani Saridin)

### **Menjabat sebagai ketua umum YPKP Sumatera Barat hingga sekarang.**

Pasca order baru pada tahun 1999 Nadiani dipertemukan oleh bapak Hasan Rahid, penulis buku *Pergulatan Muslim Komunis: Otobiografi Hasan Raid* sekaligus pendiri YPKP pusat pada tahun 1999 di Tangerang untuk menjadikan Nadiani sebagai perwakilan YPKP di Sumatera Barat lalu diresmikan pada Sabtu, 27 Juli tahun 2002 diselenggarakan di gedung RRI Bukittinggi dengan mengundang beberapa instansi-instansi pemerintahan setempat yakni DPRD, Kejaksaan, Kepolisian, serta TNI AD (Kodim) Kota Bukittinggi. Setelah diresmikan, dalam penuturan Nadiani, Aktivitas yang kita lakukan merupakan sebagai bentuk upaya dalam memperjuangkan Hak para eks tapol 1965 Sumatera Barat. YPKP 1965 Sumbar menjadi alat perjuangan para eks-tapol untuk menuntut kepada pemerintah atas keadilan terkait peristiwa G30S 1965. Kegiatan-kegiatan yang beliau lakukan seperti aktivitas penelitian, pencarian fakta-fakta di lapangan dan berinteraksi dengan berbagai lembaga negara yang berkaitan dengan penyelesaian kasus-kasus peristiwa 1965. Dalam melakukan penelitiannya, Nadiani saridin mengunjungi berbagai daerah, antara lain: Agam/Bukittinggi, Pesisir Selatan, Pariaman/Padang Pariaman, Padang, Tanah Datar, 50 Kota/Payakumbuh, Kab.Solok/Solok, Sawahlunto, Sijunjung, Padang Panjang dan Pasaman. Berikut ini daftarnya :

### **Data Korban Tragedi Kemanusiaan 1965/1966 Sumatera Barat**

No	Daerah	Korban dibunuh	Korban ditahan	Korban masih hidup
1	Padang/Padang Pariaman	387	9.450	49.186
2	Pesisir Selatan	1.013	1.889	11.068
3	Agam	13	2.412	9.700
4	Padang	15	1.500	7.575
5	Tanah Datar	65	4.038	20.515
6	50Kota/Payakumbuh	756	4.580	28.180
7	Kab. Solok/Solok	11	1.239	6.500
8	SawahLunto/Sijunjung	7	1.858	9.325
9	Padang Panjang	10	189	995
10	Pasaman	51	3.957	12.432
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.277</b>	<b>30.212</b>	<b>135.500</b>

Sumber: Arsip YPKP 1965 Sumatera Barat

Setiap tahunnya, Nadiani saridin melaporkan data-data yang beliau temukan kemudian dilaporkan ke YPKP 1965 Pusat di Jakarta untuk disatukan dengan daerah-daerah lainnya. Sampai sekarang upaya penelitian terus dilakukan oleh Nadiani saridin untuk pengembangan kasus dan penemuan-penemuan baru dikumpulkan kemudian dilaporkan kepada komnas HAM. Nadiani melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan hak asasi mereka guna mendapatkan keadilan serta terpulihkannya hak-hak mereka yang terlanggar. Adapun salah satu upaya perjuangan Nadiani adalah dengan mengadakan pelanggaran tersebut kepada Komnas HAM. Sebagai sebuah lembaga yang menjadi alat perjuangan hak-hak bagi para eks tapol yang merupakan korban pelanggaran HAM 1965, Nadiani sebagai ketua umum YPKP 1965 di Sumatera Barat juga bermitra dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK memberi bantuan pada tahun 2013 berupa bantuan medis dan psikologis untuk seluruh cabang YPKP 1965 di Indonesia. Namun sayangnya bantuan tersebut belum sepenuhnya di dapatkan oleh seluruh anggota YPKP 1965, masing-masing cabang hanya diberikan untuk beberapa orang saja, seperti di YPKP 1965 Sumatera Barat bantuan kesehatan tersebut hanya didapatkan oleh 15 orang anggota saja. Bantuan yang diberikan berupa pelayanan gratis untuk pengobatan mereka di tempat sarana kesehatan terdekat di lingkungan tempat tinggal mereka. Mereka diberikan berupa buku kendali layanan bantuan dan psikologis yang bisa mereka pergunakan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan mengingat para anggota YPKP 1965 sudah berusia lanjut. (Wawancara dengan Nadiani Saridin).

Perjuangan Nadiani mendapat secercah harapan pada akhir tahun 2003 dengan dibentuknya komisi kebenaran dan rekonsiliasi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam ketetapan MPR-RI Nomor V/MPR/2000. Akan tetapi, dalam perjalanannya harapan para korban harus sirna dengan di batalkannya UU ini oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 006/PUU-IV/2006, yang membuat harapan akan adanya kerangka formal untuk menguak kebenaran masa lalu akhirnya harus dikubur. Namun demikian untuk tetap memastikan penyelesaian berbagai kasus, khususnya proses pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi sebagai bagian dari transisi demokrasi. Dalam putusnya MK menyatakan bahwa pembatalan UU KKR tidaklah menutup upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di masa lalu melalui upaya rekonsiliasi dan kebijakan politik dalam rangka rehabilitasi dan amnesti secara umum. (Djafar. Februari 2012. Hlm 07). Pemerintah daerah Sumatera Barat secara intensif melakukan pembinaan terhadap para tapol 1965. Dari segi pembinaan setiap daerah memiliki cara masing-masing seperti di daerah kabupaten Tanah Datar dan Pesisir Selatan pemerintah melibatkan peran niniak mamak dalam pembinaan para eks tapol. Dalam pengawasan para tapol tidak bisa berpergian secara bebas, mereka diwajibkan untuk melapor dan meminta surat izin dari kantor kecamatan setempat sehingga hal tersebut mempersulit mereka untuk berpergian. Selain itu, pemerintah Sumatera Barat juga melakukan pembinaan ideologi dengan indoktrinasi yang dikenal dengan program santiadji agar para tapol bisa melupakan ideologi komunis dan menjadi seorang pancasilais. Dalam upaya pengawasan

pemerintah, setiap eks-tapol yang memerlukan surat keterangan untuk suatu keperluan harus pula dilampiri dengan Surat Keterangan Bersih Lingkungan (SKBL) dan Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD) dan mereka juga harus mengikuti program gotong royong kemana saja dengan pengarahannya dari Koramil (Patra,2021,hlm 119).

Stigma negatif terhadap Nadiani masih melekat hingga kini. Seperti yang dialaminya Februari 2015, Nadiani dijadwalkan akan menyelenggarakan diskusi tahunan yang akan membahas tentang rehabilitasi para korban tragedi kemanusiaan 1965-1966. Adapun sasaran kegiatan tersebut adalah merehabilitasi korban dan para korban yang telah lanjut usia akan diberikan bantuan psikologis dan kesehatan. Kegiatan diskusi ini sebenarnya tidak hanya dihadiri oleh pihak YPKP 1965 pusat maupun Sumbar, tetapi juga dihadiri oleh narasumber lain seperti Komnas HAM, LPSK, KontraS dan pengacara KPK. Perizinan pengadaan acara telah diurus dan sudah mendapat izin dari pemerintahan setempat, Kepolisian, dan Kodim. Rundown acara telah tersusun rapi agar pelaksanaan acara pun berjalan dengan lancar, catering untuk hidangan para tamu undangan pun telah selesai di pesan. Hanya saja Gedung yang dulunya ingin memakai gedung RRI dibatalkan oleh pihak gedung pada H-1 tanpa keterangan yang jelas, sehingga Ibu Nadiani segera mencari pengganti gedung lain, akan tetapi seperti ada yang tidak beres pada hari itu seluruh pengurus gedung yang ada di Kota Bukittinggi pada saat itu seakan kompak menolak penyewaan gedung untuk pelaksanaan acara diskusi tersebut. Karena waktu yang sudah mepet akhirnya Nadiani memutuskan memakai fasilitas seadanya yaitu halaman rumah kediamannya yang juga merupakan kantor YPKP 1965 Sumbar yang beralamat di belakang Telkom, Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi.

Pagi hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 acara diskusi pun akan segera dilaksanakan. Pada pukul 09.00 WIB para anggota YPKP 1965 dari berbagai kabupaten di Sumatera Barat mulai berdatangan. Tamu undangan dari Jakarta pun juga sudah ada yang hadir seperti perwakilan dari Komnas HAM dan LPSK. Tak lama kemudian dari seberang jalan muncul rombongan massa dengan membawa spanduk dan kayu, berbondong-bondong menuju lokasi acara dan mengobrak-abrik tenda dan rumah milik Nadiani. Massa tersebut datang bertujuan untuk mendemo YPKP 1965 Sumbar serta membubarkan paksa acara diskusi tersebut sambil menyebut acara tersebut adalah “acara PKI”. Amukan massa tersebut menganggap bahwa acara tersebut adalah acara untuk membangkitkan ideologi dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Kecurigaan warga ini didasari karena hadirnya Ketua YPKP 1965 Pusat Bedjo Untung yang diduga adalah anak dari Letkol Untung, karena adanya kesamaan nama dengan Pimpinan Dewan Revolusi PKI pada tahun 1965 tersebut. Oleh karena itu, Nadiani menegaskan bahwa Bedjo Untung tidak ada hubungan kekeluargaan sama sekali dengan Letkol Untung, kebetulan saja ada kesamaan nama. Meskipun demikian warga tetap tidak mempercayai hal tersebut Untuk menghindari amukan massa yang tak terkendalkan, pihak kepolisian pun mengamankan Nadiani beserta tamu undangan termasuk dari Komnas HAM, LPSK, dan KontraS. Hingga kini Nadiani masih aktif dalam melakukan penelitian namun akibat pandemi covid 19, aktivitas Nadiani



terhenti sejenak. Di akhir wawancara penulis dengan Nadiani saridin, beliau mengatakan bahwa prinsip YPKP Sumatera Barat hanya satu yaitu adanya rekonsiliasi dan rehabilitasi kepada para korban peristiwa 1965 dari pemerintah.(Wawancara dengan Nadiani Saridin)

## **KESIMPULAN**

Nadiani Saridin menghabiskan waktunya 60 tahun di Bukittinggi dimulai pada tahun 1957 hingga sekarang 2021. Nadiani pernah menjadi pengajar di SD 04 Bukittinggi Ateh Ngarai Bukittinggi dimasanya. Pada tahun 1964, Nadiani masuk kedalam organisasi Gerwani. Namun, Lima hari pasca G30S PKI 1965, tepatnya tanggal 5 November 1965, Nadiani dipecat dan diberhentikan sebagai pendidik karena masuk Gerwani dan harus menjadi tahanan luar wajib lapor 2x sehari ke kepolisian Bukittinggi saat itu. Menurutnya PKI dan Gerwani bukanlah afiliasi hanya saja salah satu program PKI yaitu anti poligami yang kebetulan sama dengan tujuan utama dari Gerwani tetapi hal itu membentuk persepsi yang salah bagi masyarakat. Itulah sebabnya menurut ibu pada 30 september 1965, Gerwani dihancurkan. Pasca order baru pada tahun 1999 Nadiani dipertemukan oleh bapak Hasan Rahid, penulis buku *Pergulatan Muslim Komunis: Otobiografi Hasan Raid* sekaligus pendiri YPKP pusat pada tahun 1999 di Tangerang untuk menjadikan Nadiani sebagai perwakilan YPKP di Sumatera Barat lalu diresmikan pada Sabtu, 27 Juli tahun 2002 diselenggarakan di gedung RRI Bukittinggi. Kegiatan-kegiatan yang beliau lakukan seperti aktivitas penelitian, pencarian fakta-fakta di lapangan dan berinteraksi dengan berbagai lembaga negara yang berkaitan dengan penyelesaian kasus-kasus peristiwa 1965. Dalam melakukan penelitiannya, Nadiani saridin mengunjungi berbagai daerah, antara lain: Agam/Bukittinggi, Pesisir Selatan, Pariaman/Padang Pariaman, Padang, Tanah Datar, 50 Kota/Payakumbuh, Kab.Solok/Solok, Sawahlunto, Sijunjung, Padang Panjang dan Pasaman. Sebagai sebuah lembaga yang menjadi alat perjuangan hak-hak bagi para eks tapol yang merupakan korban pelanggaran HAM 1965, Nadiani sebagai ketua umum YPKP 1965 di Sumatera Barat juga bermitra dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komnas HAM serta KontraS. Dalam penuturannya, Nadiani mengatakan bahwa prinsip YPKP Sumatera Barat itu cuma ingin adanya rekonsiliasi dan rehabilitasi kepada para korban peristiwa 1965 dari pemerintah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Arsip YPKP 1965 Sumatera Barat

Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah. (Yogyakarta : Tiara Wacana) Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, (Terj. Nugroho Notosusanto), (Jakarta: UI Press, 1986)

Mestika Zed, (Handout Metode Penelitian Biografi, 2017)

Diniah, Hikmah. 2007. Gerwani Bukan PKI, Sebuah Gerakan Feminisme Terbesar di Indonesia. Yogyakarta: Carasvati Books

- RZ. Leiressa. Biografi dan Kesejahteraan dalam kumpulan prasarana pada berbagai lokakarya (Jakarta:PIDSN)
- Taufik Abdullah, Manusia dalam Kemelut Sejarah: Sebuah Pengantar Manusia dalam Kemelut Sejarah (Jakarta:LP3ES, 1978)
- Wieringa, Saskia E. 1998. Kuntulanak Wangi, Organisasi-Organisasi Perempuan Indonesia Sesudah 1950. Jakarta: Kalyanamitra
- Adipta Wisu Wardhani (2017) Peran Ypkp Sebagai Kelompok Kepentingan (Interest Group) Dalam Memperjuangkan Hak Hak Korban Peristiwa G30S (Studi Kasus Aktivitas Ypkp Di Kabupaten Pati) Jurnal , Politika,Vol. 8, No. 1, April 2017
- Bambang Sumadjo. 1983. Beberapa Catatan Tentang Penulisan Biografi Pahlawan Dalam Kumpulan Prasarana Pada Berbagai Lokakarya ( Jakarta: PIDSN)
- Djafar Wahyudi.(2012).Mengurai Kembali Inisiatif Negara dalam Penyelesaian Masa Lalu. Elsam: Asasi Edisi Januari Februari 201,.5-14. Diambil dari [http://lama.elsam.or.id/downloads/1332921769\\_Asasi\\_Januari-Pebruari\\_2012.pdf](http://lama.elsam.or.id/downloads/1332921769_Asasi_Januari-Pebruari_2012.pdf)
- Fauzir Rahim (2018) Komunikasi Organisasi Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 Sumatera Barat (Studi Deskriptif Komunikasi Organisasi Ypkp 65 Sumatera Barat Terkait Kasus Pelanggaran Ham Berat Peristiwa 1965/1966).Skripsi, Jurusan Sejarah. Universitas Andalas
- Patra. H.(2020), Pengawasan dan Pembinaan Pemerintah Orde Baru Terhadap Eks-Tapol PKI di Sumatera Barat (1971-1998).Tesis.Padang: Universitas Andalas
- Fauzir Rahim (2018) Komunikasi organisasi YPKP 1965 Sumatera Barat terkait kasus HAM peristiwa 1965, Skripsi, jurusan sejarah, UNAND
- Maiwan, Mohammad. Kelompok Kepentingan (Interest Group), Kekuasaan dan Kedudukan dalam Sistem Politik. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi Volume 15, Nomor 2, April 2016
- Wardayana, M. K.(2010).Keadilan Bagi yang Berbeda Paham: Rekonsiliasi dan Keadilan Bagi Korban Tragedi 1965. Mimbar Hukum,22(1),97-113. Diambil dari <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/16211/10757>
- Wawancara dengan Nadiani Saridin